

# PERHITUNGAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 – 2019

Silvia Melinda, Adilistiono

Politeknik Negeri Semarang, Jl Prof Soedharto, SH Tembalang Semarang  
[adilistiono2011@gmail.com](mailto:adilistiono2011@gmail.com)

**Abstract:** *Regional Tax is one of the components of the Regional Original Income. One type of Local Taxes namely Restaurant Tax. The aim of this research is to determine the effectiveness and contribution of Restaurant Tax to the Regional Original Income Banjarnegara District in 2015 – 2019. Data collection is done through interview method, documentaries method and literature review method . The method of data calculation used is with the effectiveness analysis, tax contribution analysis of Restaurant to Regional Original Income as well as regression analysis and correlation to know whether the relationship between these variables is a coincidence or indeed a strong relationship. The results of this study indicate that the level of effectiveness of the Restaurant Tax on Regional Revenue District Banjarnegara Year 2015 – 2019 as a whole is very effective. But, the contribution of Restaurant Tax to Regional Original Income is still very less because from 2015 – 2019 only at 0 – 10% and the relationship between Restaurant Tax with Regional Original Income Banjarnegara Regency in positive, it means that the increase of Restaurant Tax acceptance will influence the increase of received Regional Original Income.*

**Keywords :** *Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Regional Original Income*

**Abstrak:** Pajak daerah merupakan salah satu komponen penyusunan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, metode dokumenter dan metode studi pustaka. Metode perhitungan data yang digunakan adalah analisis efektivitas, analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara serta analisis regresi dan korelasi untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara variabel-variabel tersebut adalah suatu kebetulan atau memang hubungan yang kuat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 secara keseluruhan sangat efektif. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara masih sangat kurang dikarenakan dari tahun 2015 – 2019 hanya berada pada angka 0 – 10% dan hubungan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah positif, artinya bertambahnya penerimaan pajak restoran akan mempengaruhi bertambahnya pendapatan asli daerah yang diterima.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya sendiri (desentralisasi). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur pertumbuhan dan perekonomian daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan kantor/intansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola berbagai sumber pendapatan daerah maupun aset daerah. Adapun salah satu tugas yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yaitu mengelola dan memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah serta hasil pemungutannya yang diserahkan kepada pemerintah

daerah dan dijadikan sebagai pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah otonom dan salah satu kota di Pulau Jawa memiliki potensi sektor usaha yang cukup bagus, sehingga saling bersaing untuk menciptakan inovasi makanan yang lebih menarik lagi. Secara tidak langsung karena omzet yang cukup tinggi mampu membantu pembangunan daerah di Indonesia dan berdampak pada peningkatan pendapatan di bidang kuliner di daerah Kabupaten Banjarnegara.

Untuk mengetahui baik atau buruknya pendapatan daerah, maka perlu dilakukan perhitungan efektivitas. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas pajak restoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena dengan efektivitasnya suatu pajak daerah, maka pajak restoran dapat terealisasi sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjarnegara. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan agar penerimaan pajak daerah dapat terealisasi dan meningkat setiap tahunnya. Kontribusi pajak restoran juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Namun, meningkatnya kontribusi pajak daerah belum tentu penerimaan pajak daerah ikut meningkat bisa saja penerimaan pajak daerah nilainya tetap atau menurun.

Mengingat bahwa jumlah objek pajak restoran setiap tahunnya semakin banyak, namun demikian masih ada kendala dalam sistem pemungutan yang diterapkan yaitu sistem perhitungan pajak sendiri dan dalam melaporkan pajak belum mencerminkan pajak yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perhitungan efektivitas dan kontribusi yang dicapai pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019.
- 2) Untuk menganalisa pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan ini meliputi : klasifikasi data, metode pengumpulan data, metode penulisan, dan metode analisis data.

1. Data Menurut Sifatnya  
Menurut sifatnya, jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data Kualitatif  
Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, penelitian ini dilakukan pada saat berinteraksi langsung di tempat kerja.

Menurut Bungin (2013:124), “Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek”. Data kualitatif yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi gambaran umum, struktur organisasi, visi dan misi BPPKAD Banjarnegara.

- b. Data Kuantitatif  
Bungin (2013: 126) menjelaskan bahwa, “data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka-angka atau hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang”. Data kuantitatif yang digunakan meliputi pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 dan pajak pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019.

2. Data Menurut Sumbernya  
Menurut sumbernya, jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data Primer  
Menurut Nur dan Bambang (2016:146) menyebutkan, “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada staff bidang pendapatan pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.

- b. Data Sekunder  
Menurut Nur dan Bambang (2016:147) menyebutkan, “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.

Data sekunder yang diperoleh berupa gambaran umum BPPKAD Banjarnegara berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 dan pajak pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu metode penelitian dan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data, serta menguji data dari informasi yang telah dikumpulkan. Metode pengumpulan data yang diperlukan adalah:

#### a. Wawancara

Menurut Bungin (2013:133), “Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara”. Wawancara yang dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pegawai bidang pendapatan untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.

#### b. Studi Dokumenter

Menurut Bungin (2013:153), “Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan yang digunakan dalam metodologi

penelitian sosial dan digunakan untuk menelusuri data historis”. Metode dokumenter yang dilakukan yaitu untuk memperoleh data pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 dan pajak pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019.

#### c. Studi Pustaka

“Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti.” (Sugiyono, 2016:291). Studi pustaka dilakukan dengan membaca dan memahami dokumen-dokumen seperti buku, catatan dan bentuk dokumen lainnya. Dalam tugas akhir ini studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi yang mendukung penyusunan tugas akhir ini, yaitu yang mendasari tentang penerimaan pajak daerah.

### 4. Metode Penulisan

#### a. Metode Deskripsi

Menurut Bungin (2013:48) menyatakan bahwa, “tujuan metode ini yaitu untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu”. Metode deskripsi yang diperlukan berupa gambaran umum, visi misi, dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

#### b. Metode Eksplanasi

Menurut Bungin (2013:51) menyatakan bahwa, “metode eksplanasi dimaksud untuk

menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain, karena itu penelitian eksplanasi menggunakan hipotesis dan untuk menguji hipotesis digunakan statistik infrensial". Metode ini memaparkan hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Banjarnegara sebagai wilayah otonom dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan penuh terhadap daerahnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara berorientasi pada pengelolaan keuangan dan penataan administrasi aset daerah yang diharapkan mampu menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah, guna dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, memberikan layanan secara cepas, tepat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga menunjang terwujudnya pemerintahan yang baik dan membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada perangkat daerah di lingkungan

pemerintah daerah dan melaksanakan penataan inventarisasi aset daerah sebagai bentuk kekayaan daerah.

### a. Visi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi suatu organisasi menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai dengan berdasarkan pada kondisi riil yang ada dan terjadi pada saat awal periode perencanaan. Dengan pernyataan visi, suatu organisasi dapat diketahui kearah mana organisasi tersebut hendak dibawa dan cita-cita apa yang diinginkan dimasa yang akan datang. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara memiliki visi yaitu "Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera". Ini sesuai dengan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Banjarnegara.

### b. Misi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

Untuk mewujudkan visi, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah memiliki misi yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
- 4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif,

- transparan dan akuntabel dengan tenaga professional
- 5) Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar

### Tugas BPPKAD

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

### Fungsi BPPKAD

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- 4) Pelaksanaan kebijakan selaku Bendahara Umum Daerah
- 5) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah,

- akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
  - 7) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
  - 8) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB.
  - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Struktur Organisasi BPPKAD

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat  
Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran  
Bidang anggaran terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Anggaran
  2. Seksi Bina Keuangan Daerah
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah  
Bidang perbendaharaan dan kas daerah terdiri dari :
  1. Seksi Perbendaharaan
  2. Seksi Gaji dan Kas Daerah
- e. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data  
Bidang akuntansi dan pengolahan data terdiri dari :
  1. Seksi Akuntansi

- 2. Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran
- f. Bidang Aset Daerah  
Bidang aset daerah terdiri dari:
  - 1. Seksi Penatausahaan Aset
  - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
  - 3. Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset
- g. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya  
Bidang pendapatan daerah lainnya terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
  - 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
  - 3. Seksi Penagihan dan Penerimaan
- h. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
Bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
  - 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
  - 3. Seksi Penagihan dan Penerimaan
- i. UPTB  
Kelompok Jabatan Fungsional

**Perhitungan Efektivitas**

Untuk mengetahui bagaimana cara menilai kriteria tersebut. Maka tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2016:170)

Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banjarnegara diukur efektivitasnya agar pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dapat mengetahui seberapa besar target yang telah dicapai dalam

penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini disajikan tabel efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 – 2019**

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4) = (3/2) x 100%	(5)
2015	Rp 1.250.000.000,00	Rp 1.834.508.771,00	146,76%	Sangat Efektif
2016	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.677.577.519,00	133,88%	Sangat Efektif
2017	Rp 2.250.000.000,00	Rp 3.333.763.757,00	148,17%	Sangat Efektif
2018	Rp 3.042.500.000,00	Rp 3.803.670.657,00	125,02%	Sangat Efektif
2019	Rp 3.500.000.000,00	Rp 4.943.800.998,00	141,25%	Sangat Efektif
	Rata-Rata		139,02%	Sangat Efektif

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2020

Penilaian efektivitas pajak restoran tersebut menggunakan indikator yang telah dibuat. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka akan disajikan Kembali tabel penilaian efektivitas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. Kriteria Penilaian Efektivitas**

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Fisipol Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Candra:2015).

Berdasarkan tabel di atas penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 – 2019 memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif, yakni rata-rata tingkat efektivitas sebesar 139,02%. Hal tersebut berarti pada tahun 2015 – 2019 jumlah presentase dan rata-rata presentase efektivitas pajak restoran selalu lebih dari 100%. Tingkat efektivitas yang mencapai lebih dari 100% dikarenakan realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target yang sudah ditetapkan. Akan tetapi tingkat efektivitas pajak restoran tidak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 146,76% mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar 133,88%. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 148,17%, ini merupakan tinggkat efektivitas tertinggi yang terjadi sela tahun 2015 - 2019. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 125,02% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 141,25%.

Jika dilihat pajak restoran secara keseluruhan tingkat efektivitasnya melebihi 100%, artinya dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam segi penerimaan pajak restoran sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

### Perhitungan Kontribusi

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2004:163 (dalam Candra:2015)

Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 sudah mencapai target pada setiap tahunnya. Jika dilihat dari pajak rumah makan dari tahun 2015 – 2019 banyak yang tidak sesuai dengan target, hanya pada tahun 2016 pajak rumah makan yang dapat memenuhi target. Penerimaan pajak restoran setiap tahunnya meningkat, tetapi kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2015 – 2019 tergolong sangat kurang. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan asli daerah tidak hanya berasal dari pajak restoran, sehingga belum menjamin pajak restoran memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini disajikan tabel kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 3 halaman berikutnya:

**Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 – 2019**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)x100%	(5)
2015	Rp 1.834.508.771,00	Rp 180.561.068.549,00	1,02%	Sangat Kurang
2016	Rp 2.677.577.519,00	Rp 221.048.387.512,00	1,21%	Sangat Kurang
2017	Rp 3.333.763.757,00	Rp 297.485.382.003,00	1,12%	Sangat Kurang
2018	Rp 3.803.670.657,00	Rp 235.994.436.137,00	1,61%	Sangat Kurang
2019	Rp 4.943.800.998,00	Rp 257.700.650.110,00	1,92%	Sangat Kurang
	Rata-Rata		1,38%	Sangat Kurang

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui penerimaan pajak restoran masih kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini diketahui karena rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 – 2019 sebesar 1,38% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara. Namun tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2015 – 2019 mengalami kenaikan, kecuali tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 tingkat kontribusinya sebesar 1.02%, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,21%, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,12%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 1,61%, tahun 2019 merupakan tingkat kontribusi terbesar dari tahun 2015 – 2019 yaitu menjadi sebesar 1,92%. Berdasarkan kriteria kontribusi ini termasuk dalam kategori sangat kurang. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berikut disajikan tabel kriteria kontribusi yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Prosentase	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Fisipol Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Candra:2015)

#### Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent (X) dengan satu variabel dependen (Y). Dimana variabel dependen nilainya dipengaruhi oleh besar kecilnya variabel independent. Variabel dependen (Y) dalam Tugas Akhir ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan variabel independent (X) adalah pajak restoran. Analisis regresi yang digunakan adalah metode jumlah kuadrat terkecil dengan didasarkan pada persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana nilai a dan b dicari dengan dua rumus yaitu:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

X : Variabel Independen (Variabel Bebas)

Y : Variabel Dependen (Variabel Terikat)

a : Konstanta (intersep), merupakan jarak antara titik-titik potong garis regresi dengan sumbu vertikal terhadap 0 (titik asal) atau dengan kata lain besarnya nilai Y taksiran X = 0

b : Koefisien regresi, yaitu besarnya variabel Y akibat perubahan satu unit variabel X

n : Jumlah data atau pengamatan

Dari rumus diatas dapat diketahui besarnya koefisien regresi (b) yaitu 23,32 dan besarnya konstanta (a) yaitu 161.151.536.560,87. Jadi persamaan regresinya adalah  $Y = 161.151.536.560,87 + 23,32 X$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat disimpulkan bahwa : (1) Konstanta (a) sebesar 161.151.536.560,87 artinya jika pajak restoran (X) nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah (Y) nilainya sebesar 161.151.536.560,87. (2) Koefisien regresi (b) sebesar 23,32 artinya perubahan nilai pajak daerah apabila pajak restoran berubah satu satuan.

### Analisis Korelasi

Tujuan dari analisis korelasi yaitu untuk menentukan hubungan antara dua variabel, variabel bebas (pajak restoran) dan variabel terikat (pendapatan asli daerah). Koefisien

korelasi digunakan untuk menentukan keeratan hubungan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Perhitungan analisis korelasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

X : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat

r : Koefisien Korelasi

n : Jumlah Data/Pengamatan

Berdasarkan perhitungan analisis korelasi yang telah dilakukan, hasil yang didapatkan adalah r sebesar 0,63. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara pajak restoran (X) dan pendapatan asli daerah (Y) bersifat positif karena nilai korelasinya berada antara 0 dan 1, atau  $0 < r < 1$  yang berarti korelasi antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah bersifat positif, searah dan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak restoran mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan. Sedangkan apabila pajak restoran mengalami penurunan, maka pendapatan asli daerah mengalami penurunan.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 memiliki tingkat keefektifitasan yang sangat efektif dengan rata-rata sebesar 139,02%. Tingkat efektivitas yang mencapai lebih dari 100%

dikarenakan realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki rata-rata sebesar 20,89% dengan kriteria sedang. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 – 2019 belum maksimal, memiliki rata-rata 1,38% yang tergolong sangat rendah.

2. Efektivitas dan kontribusi pajak restoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Semakin kecil penerimaan pajak restoran maka, semakin kecil pendapatan asli daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan hasil perhitungan regresi dan korelasi sebagai berikut :

- a. Regresi didapat persamaan  $Y = 161.151.536.560,87 + 23,32 X$  dapat disimpulkan bahwa konstanta sebesar 161.151.536.560,87 artinya jika pajak restoran (X) nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah (Y) nilainya sebesar 161.151.536.560,87 dan nilai koefisien regresi pajak restoran (X) sebesar 23,32 artinya perubahan nilai pajak daerah apabila pajak restoran berubah satu satuan. Jika nilai pajak restoran (X) nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara (Y) juga mengalami penurunan.
- b. Korelasi didapat hasil sebesar 0,63. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas memiliki pengaruh yang positif karena nilai korelasinya ( $r = 0,63$ ) berada diantara 0 dan 1, atau  $0 < r < 1$  yang artinya korelasi antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah bersifat positif, searah, dan kuat.

Ditinjau dari hasil perhitungan efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran termasuk dalam kriteria sangat efektif. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Kurangnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara disebabkan adanya kenaikan penerimaan salah satu sumber pendapatan asli daerah lainnya yang menyebabkan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara naik secara signifikan namun tidak diikuti dengan kenaikan yang signifikan pada pajak restoran.

Pemerintah daerah khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara harus dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan ekstensifikasi pajak daerah dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendata wajib pajak baru yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Predan Media Grup.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi*

*Terbaru 2018*. Yogyakarta:  
C.V Andi Offset.

Nomor 32 Tahun 2004  
tentang *Pemerintahan  
Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten  
Banjarnegara Nomor 5 Tahun  
2019 tentang *Pajak Daerah*

Republik Indonesia, Undang-Undang  
Nomor 33 Tahun 2004  
tentang *Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah  
Pusat dan Daerah*.

Peraturan Bupati Kabupaten  
Banjarnegara Nomor 82  
Tahun 2016 tentang  
*Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan  
Fungsi serta Tata Kerja  
Badan Pengelolaan  
Pendapatan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten  
Banjarnegara*

Romanda, Candra. 2015. *Kontribusi  
dan Efektivitas Pajak Daerah  
Terhadap Pendapatan Asli  
Daerah Kabupaten Musi  
Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan*. Jurnal Akuntansi  
Politeknik  
Sekayu(ACSY). Volume II,  
No.1 April 2015.  
[http://jurnal.polsky.ac.id/index.  
php/acsy/article/download/93/3](http://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/download/93/3)  
5. diakses tanggal 21 Juli  
2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014  
tentang *Pemerintahan  
Daerah*.

Republik Indonesia, Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2007  
tentang *Ketentuan Umum dan  
Tata Cara Perpajakan*.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, dan  
Kombinasi (Mixed Methods)*.  
Yogyakarta: CV. Alfabeta.

Republik Indonesia, Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009  
tentang *Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah*.

Sukardi. 2011. *Metodologi  
Penelitian Pendidikan:  
Kompetensi dan Praktiknya*.  
Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia, Undang-Undang

Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis  
Regresi Dan Uji Hipotesis*.  
Yogyakarta: CAPS.